



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Partai Buruh Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 5 Juni 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Senin (05/06), pukul 13.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 50/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh Ferri Nuzarli.

Dalam Permohonannya Pemohon menjelaskan penetapan UU Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tindakan Presiden dan DPR yang mengabaikan putusan MK jelas dan secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa seluruh lembaga negara termasuk lembaga pembentuk undang-undang harus tunduk dan taat pada hukum (konstitusi) termasuk pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Menurut Pemohon, tidak taatnya pembentuk undang-undang terhadap Putusan MK menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Dalam petitum, Pemohon meminta MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang Pendahuluan Selasa (23/5) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan dari sisi perumusan uraian permohonan kelihatan sudah rapi, mudah dipahami. Akan tetapi, Enny meminta Pemohon untuk memperkuat *legal standing* pemohon “Ada hal yang perlu digarisbawahi soal sesungguhnya siapa Pemohon ini. Pemohonnya Partai Buruh, bukan lagi federasi. Ini sudah Partai Buruh. Jadi, entitasnya Partai Buruh, yang pokoknya itu partai buruh jadi sudah membawa Partai Buruhnya, yang dimintakan *standingnya* itu Partai Buruh. Ini yang harus kuat di sini. Tolong nanti ditambahkan penguatan terutama pertautan kepentingan langsung dan tidak langsung Partai Buruh. Dari sisi AD/ART apa yang bisa memperkuat pertautan dari Partai Buruh,” saran Enny.

Kemudian, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga menyarankan pemohon untuk menguraikan perppu yang terdahulu dengan perppu yang ada saat ini. Selain itu, pada bagian petitum, Manahan mengatakan petitum telah dipedomani PMK dalam permohonan ini. “Tolong uraikan apa perbedaan-perbedaan atau hal yang menyangkut kepentingan buruh apakah ada yang dilonggarkan atau lebih dikedatkan,” ujarnya. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id